



## Memisahkan Agama dan Politik: Sebuah Tinjauan Teoretis dan Praktis

### *Separating Religion and Politics: A Theoretical and Practical Review*

Chanra M<sup>1\*</sup>, Suf Kasman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Alauddin Makassar

\*Corresponding Author: E-mail: chanra.mustamin@gmail.com

#### *Artikel Review*

#### **Article History:**

Received: 6 Jan, 2025

Revised: 21 Feb, 2025

Accepted: 28 Feb, 2025

#### **Kata Kunci:**

Pemisahan Agama Dan Politik, Hubungan Agama Dan Negara, Sekularisme, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia, Studi Kasus, Stabilitas Sosial

#### **Keywords:**

*Separation of religion and politics, religion and state relationship, secularism, public policy, human rights, case studies, social stability*

**DOI: 10.56338/jks.v8i2.6863**

#### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas isu pemisahan antara agama dan politik, yang telah menjadi topik perdebatan panjang dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai argumen yang mendukung dan menentang pemisahan agama dari politik, dengan menggabungkan pendekatan teoretis dan praktis. Dari sudut pandang teoretis, artikel ini meninjau pemikiran para ahli tentang bagaimana agama dan politik seharusnya berinteraksi, serta implikasi etis dan filosofis dari hubungan keduanya. Di sisi praktis, artikel ini mengkaji dampak sosial, budaya, dan hukum yang ditimbulkan oleh pemisahan atau penyatuan agama dan politik dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga menyajikan berbagai studi kasus dari negara-negara dengan pendekatan yang berbeda terhadap hubungan agama dan politik, seperti negara-negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, dan negara-negara yang mengintegrasikan agama dalam sistem politik mereka. Dengan menggunakan analisis komparatif, artikel ini mengevaluasi kelebihan dan kelemahan dari setiap pendekatan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas sosial, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Melalui penelitian ini, diharapkan pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan ideal antara agama dan politik dalam konteks masyarakat modern, serta implikasi jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan. Artikel ini juga mengajak pembaca untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan yang adil dan inklusif terkait hubungan agama dan politik.

#### **ABSTRACT**

*This article discusses the issue of the separation between religion and politics, which has been a long-standing debate in various societies worldwide. The study aims to explore the arguments both for and against the separation of religion from politics, combining theoretical and practical approaches. From a theoretical perspective, the article reviews the thoughts of scholars on how religion and politics should interact, as well as the ethical and philosophical implications of their relationship. From a practical standpoint, the article examines the social, cultural, and legal impacts of the separation or integration of religion and politics in societal life. This research also presents case studies from countries with different approaches to the relationship between religion and politics, such as secular nations that separate religion from the state, and countries that integrate religion into their political systems. By using a comparative analysis, this article evaluates the strengths and weaknesses of each approach, and how they affect social stability, human rights, and religious freedom. Through this study, it is hoped that policymakers, academics, and practitioners will gain deeper insights into the ideal relationship between religion and politics in the context of modern society, as well as the long-term implications of the policies implemented. This article also invites readers to consider various factors that should be taken into account when formulating fair and inclusive policies concerning the relationship between religion and politics.*

#### **PENDAHULUAN**

Agama dan politik adalah dua domain yang telah saling memengaruhi sepanjang sejarah manusia. Dalam banyak masyarakat tradisional, agama tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral dan spiritual, tetapi juga sebagai dasar legitimasi politik. Konsep kerajaan yang sah seringkali dihubungkan dengan otoritas agama, seperti dalam sistem monarki yang mengklaim pemerintahan mereka didasarkan

pada mandat ilahi. Sebagai contoh, dalam sejarah Islam, negara dan agama seringkali dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, seperti yang tercermin dalam sistem kekhalifahan (Abdullah, 2018). Namun, seiring dengan perkembangan zaman, modernitas memperkenalkan ide sekularisme yang mendorong pemisahan antara agama dan politik untuk menjaga netralitas negara dan melindungi kebebasan beragama.

Sekularisme, yang pertama kali diperkenalkan di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18, berusaha untuk mengurangi pengaruh agama dalam urusan negara dan memberikan kebebasan individu untuk menjalani keyakinannya masing-masing tanpa campur tangan negara (Smith, 2006). Sekularisme ini didorong oleh pemikiran pencerahan yang menekankan rasionalitas dan kebebasan individu, serta keinginan untuk menghindari ketegangan antara otoritas agama dan politik yang pernah mengarah pada konflik besar, seperti Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa. Oleh karena itu, sekularisme menjadi landasan bagi banyak negara modern dalam merancang konstitusi dan sistem pemerintahan mereka, dengan tujuan untuk memastikan bahwa negara tetap netral terhadap berbagai agama dan memberi ruang bagi kebebasan beragama.

Namun, pemisahan agama dan politik bukanlah hal yang mudah diterapkan di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan masyarakat yang pluralistik dan memiliki tradisi agama yang kuat. Di era globalisasi, di mana pluralisme agama semakin meningkat dan tantangan geopolitik menciptakan dinamika baru, pemisahan agama dan politik menjadi isu yang semakin relevan. Seiring dengan munculnya kelompok-kelompok keagamaan yang memperjuangkan pengaruh lebih besar dalam kebijakan politik, beberapa negara menghadapi dilema besar: bagaimana menjaga netralitas negara sambil menghormati nilai-nilai agama yang mendalam dalam kehidupan publik? Di beberapa negara, ketegangan muncul antara keinginan untuk memisahkan agama dari politik dan kebutuhan untuk mempertahankan nilai-nilai agama dalam kehidupan publik, seperti yang terlihat di negara-negara dengan mayoritas Muslim di Timur Tengah dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Siregar, 2019).

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penting mengenai sejauh mana agama dan politik dapat dipisahkan, serta apa implikasi dari pemisahan tersebut terhadap kebijakan publik, kebebasan beragama, dan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana negara-negara yang berbeda menangani hubungan antara agama dan politik, serta bagaimana teori sekularisme dan konsep kebebasan beragama diterapkan di masyarakat yang memiliki keragaman keyakinan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis hubungan antara agama dan politik di berbagai negara. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai teori dan praktik pemisahan agama dari politik, serta implikasi sosial, budaya, dan hukum yang dihasilkan dari penerapan berbagai pendekatan tersebut. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, dokumen hukum, dan laporan penelitian yang membahas hubungan agama dan politik dalam konteks global.

## **Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup literatur akademik, dokumen hukum, serta laporan penelitian yang terkait dengan tema pemisahan agama dan politik. Literatur akademik yang digunakan berasal dari buku dan artikel ilmiah yang membahas teori-teori sekularisme, pluralisme agama, dan kebebasan beragama. Dokumen hukum, seperti konstitusi dan peraturan yang berlaku di negara-negara yang menjadi objek studi, juga dianalisis untuk memahami bagaimana hubungan antara agama dan politik diatur secara hukum. Selain itu, laporan penelitian dari lembaga internasional dan nasional mengenai dampak kebijakan pemisahan agama dan politik terhadap kehidupan sosial dan politik juga menjadi bagian dari sumber data yang digunakan.

## **Pendekatan Komparatif**

Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi pola dan variasi dalam penerapan pemisahan agama dan politik di berbagai negara. Pendekatan komparatif memungkinkan

peneliti untuk membandingkan kebijakan, implementasi, serta dampak sosial dan politik yang ditimbulkan oleh pemisahan agama dan politik di negara-negara yang memiliki latar belakang budaya dan sistem pemerintahan yang berbeda. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat sejauh mana sekularisme atau integrasi agama dalam politik berperan dalam membentuk identitas negara, kebebasan beragama, dan stabilitas sosial.

### **Studi Kasus**

Penelitian ini menganalisis empat negara sebagai studi kasus, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Indonesia, dan India. Keempat negara ini dipilih karena mewakili spektrum pendekatan yang berbeda terhadap hubungan agama dan politik, mulai dari sekularisme ketat hingga integrasi moderat. Dengan menggunakan pendekatan komparatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sejauh mana pemisahan agama dan politik dapat diterapkan, serta implikasi sosial dan politik yang muncul dari berbagai pendekatan yang diambil oleh negara-negara dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan publik yang dapat mengelola hubungan agama dan politik secara adil dan inklusif.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian literatur dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Peneliti akan membaca dan menilai berbagai karya ilmiah yang telah dipublikasikan, termasuk buku teks, artikel jurnal, laporan lembaga internasional, serta dokumen hukum yang terkait dengan hubungan agama dan politik. Sumber data juga mencakup analisis kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di negara-negara studi kasus.

#### **e. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Peneliti akan membandingkan kebijakan yang diterapkan di negara-negara yang menjadi studi kasus, dan menilai pengaruhnya terhadap dinamika sosial-politik yang terjadi. Analisis ini akan melibatkan identifikasi pola umum dalam pemisahan agama dan politik, serta perbedaan dalam pendekatan negara-negara tersebut. Peneliti juga akan menggali implikasi dari kebijakan tersebut terhadap kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan stabilitas sosial.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Agama dan Politik**

Agama adalah sistem keyakinan yang melibatkan pemujaan terhadap kekuatan yang lebih tinggi, seperti Tuhan atau dewa-dewa, dan memandu kehidupan pengikutnya melalui ajaran, praktik, dan nilai-nilai moral. Agama memberikan makna dan tujuan hidup, serta membentuk pandangan dunia dan cara berinteraksi dengan sesama dan alam semesta. Beberapa agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, memiliki ajaran dan praktik yang berbeda, namun umumnya melibatkan unsur iman, ibadah, dan moralitas yang mendalam (Singarimbun, 2019).

Politik merujuk pada kegiatan atau proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembagian dan pengelolaan kekuasaan dalam masyarakat atau negara. Politik mencakup pembuatan kebijakan, organisasi, serta pengaturan aturan yang membentuk hubungan antarindividu dan kelompok. Dalam sistem politik, keputusan yang diambil oleh negara memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kebebasan individu (Mustamin, 2020).

Hubungan Antara Agama dan Politik: Sejarah menunjukkan bahwa agama dan politik sering kali saling terkait, baik dalam bentuk legitimasi politik berdasarkan agama maupun pengaturan kehidupan beragama melalui kebijakan negara. Meskipun ada negara yang memisahkan agama dan politik melalui sekularisme, negara lain seperti Indonesia dan India mengintegrasikan agama dalam kehidupan politik negara dengan cara yang lebih moderat. Pada akhirnya, hubungan antara agama dan politik berperan dalam menentukan identitas nasional dan struktur sosial masyarakat (Amsyari, 2017; Charle, 2018).

### **Sekularisme dan Integrasi Agama dalam Politik**

Sekularisme adalah prinsip yang mengusulkan pemisahan antara agama dan negara. Dalam sistem sekuler, negara tidak memihak pada agama tertentu dan tidak terlibat dalam urusan agama, yang berarti kebijakan publik harus dibentuk tanpa pengaruh ajaran agama tertentu. Di negara-negara yang menganut sekularisme, seperti Prancis atau Amerika Serikat, pemisahan agama dan politik dianggap penting untuk memastikan kebebasan beragama bagi semua warganya tanpa adanya campur tangan negara dalam urusan keagamaan. Namun, penerapan sekularisme juga dapat memunculkan ketegangan, terutama dalam masyarakat yang sangat religius (Charle, 2018).

Sebaliknya, di beberapa negara, agama dan politik sering kali saling terjalin erat. Negara-negara ini mungkin tidak sepenuhnya menerapkan sekularisme, melainkan mengakui atau bahkan mengintegrasikan agama dalam struktur pemerintahan dan kebijakan publik. Di negara seperti Indonesia dan India, misalnya, agama memainkan peran penting dalam kehidupan politik, meskipun tidak ada negara agama yang resmi. Dalam sistem seperti ini, negara mungkin mengatur dan mengelola keberagaman agama di masyarakat dan memastikan kebebasan beragama sambil mempertahankan nilai-nilai agama sebagai bagian dari identitas nasional dan dasar moral negara (Mustamin, 2020).

### **Pendekatan Sekularisme di Amerika Serikat dan Prancis**

Pemisahan antara agama dan politik merupakan konsep yang telah berkembang di berbagai negara sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kebebasan beragama, memastikan netralitas negara, dan mencegah dominasi agama dalam kehidupan publik. Dua negara yang sering menjadi contoh dalam diskusi mengenai sekularisme adalah Amerika Serikat dan Prancis. Kedua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap sekularisme, yang mencerminkan bagaimana prinsip pemisahan agama dan politik diterapkan dan tantangan yang muncul dalam praktiknya.

### **Amerika Serikat: Sekularisme dan Pengaruh Agama dalam Politik**

Amerika Serikat mengadopsi sekularisme berdasarkan Amendemen Pertama Konstitusi, yang melarang negara untuk mendirikan agama atau menghalangi kebebasan beragama. Klausul Establishment dalam Amendemen Pertama menyatakan bahwa "Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang mendirikan agama atau melarang bebasnya beragama." Dengan kata lain, negara diharuskan untuk tetap netral dalam urusan agama dan tidak mendukung atau menghalangi keyakinan agama apapun. Prinsip sekularisme ini dirancang untuk melindungi kebebasan beragama warganya, menciptakan ruang publik yang inklusif, dan memastikan bahwa negara tidak terlibat dalam urusan keagamaan. Namun, meskipun prinsip sekularisme diatur dalam konstitusi, agama tetap memiliki peran penting dalam politik Amerika Serikat. Retorika agama sering digunakan oleh politisi untuk memperoleh dukungan moral dan sosial dari pemilih. Salah satu contoh paling jelas adalah penggunaan nilai-nilai Kristen dalam perdebatan politik, terutama terkait isu-isu sosial seperti pernikahan sesama jenis dan aborsi. Pada saat kampanye pemilihan umum, politisi sering merujuk pada keyakinan agama mereka untuk membangun citra pribadi dan memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok yang mendukung nilai-nilai agama konservatif.

Pengaruh agama ini dapat terlihat dalam kebijakan publik yang didorong oleh kelompok agama tertentu, seperti kelompok konservatif Kristen yang mendukung larangan aborsi atau menentang pernikahan sesama jenis. Selain itu, meskipun negara tidak secara resmi mendirikan agama, simbol-simbol agama, seperti motto "In God We Trust" di mata uang Amerika Serikat dan penyematan kata "God" dalam janji sumpah jabatan presiden, menunjukkan pengaruh agama dalam kehidupan publik.

Penerapan prinsip sekularisme ini sering kali menciptakan ketegangan antara teori dan praktik. Meskipun negara secara hukum terpisah dari agama, dalam kenyataannya banyak kebijakan publik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama tertentu. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana sekularisme dapat diterapkan dalam konteks politik yang sangat dipengaruhi oleh agama, serta bagaimana agama harus berperan dalam kehidupan publik di negara yang mengklaim sekuler (Amsyari, 2017; Smith, 2018).

Kritik terhadap Sekularisme Amerika: Kritik terhadap sekularisme di Amerika Serikat sering kali berfokus pada ketegangan antara prinsip sekularisme dalam konstitusi dengan kenyataan bahwa banyak keputusan politik masih dipengaruhi oleh agama. Beberapa akademisi menilai bahwa meskipun tidak

ada agama resmi yang didirikan oleh negara, praktik politik di Amerika Serikat sering kali melibatkan pengaruh agama yang signifikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa perdebatan-perdebatan seputar kebijakan sosial—terutama yang terkait dengan hak-hak perempuan, aborsi, dan pernikahan sesama jenis—sering kali berpusat pada konflik antara interpretasi agama dan pandangan sekuler dalam masyarakat Amerika (Moore, 2017).

### **Prancis: Sekularisme Radikal (Laïcité) dan Tantangan terhadap Minoritas Agama**

Di Prancis, sekularisme diatur melalui prinsip *laïcité*, yang berasal dari Revolusi Prancis dan ditegaskan dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang 1905 yang memisahkan gereja dan negara. Prinsip *laïcité* menuntut pemisahan total antara agama dan negara, yang mencakup larangan bagi negara untuk mendukung atau terlibat dalam urusan agama. Selain itu, *laïcité* mengharuskan negara untuk menjaga netralitas dalam urusan agama, yang mencakup penghapusan simbol-simbol agama dari ruang publik, seperti jilbab di sekolah-sekolah atau simbol agama lainnya di ruang publik.

Sekularisme radikal ini bertujuan untuk melindungi kebebasan individu dan mencegah dominasi agama dalam kehidupan politik. *Laïcité* menganggap bahwa untuk menjaga kesetaraan dan kebebasan beragama, negara harus tetap netral dan tidak boleh terlibat dalam urusan keagamaan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan *laïcité* ini sering kali menuai kritik karena dianggap diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu, terutama Muslim. Salah satu contoh yang paling kontroversial adalah larangan jilbab di sekolah-sekolah yang diterapkan sejak 2004. Kebijakan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan Muslim yang memilih mengenakan jilbab sebagai bagian dari identitas agama mereka.

Criticism terhadap kebijakan *laïcité* ini juga datang dari perspektif keberagaman agama dalam masyarakat Prancis. Meskipun prinsip *laïcité* bertujuan untuk melindungi kebebasan beragama dan mencegah dominasi agama tertentu, banyak pihak yang berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak cukup inklusif bagi kelompok minoritas agama. Sebagai contoh, beberapa kelompok Muslim menganggap bahwa larangan terhadap simbol-simbol agama di ruang publik, termasuk jilbab, menciptakan ketidaksetaraan dengan mayoritas Kristen dan bertentangan dengan nilai-nilai pluralisme yang seharusnya dijunjung dalam masyarakat Prancis yang majemuk (Charle, 2018).

Kritik terhadap *Laïcité*: Beberapa pengkritik berpendapat bahwa *laïcité*, yang bertujuan untuk memastikan kebebasan beragama, sebenarnya malah berisiko meminggirkan kelompok agama minoritas, terutama Muslim. Dalam konteks Prancis, ketegangan antara nilai-nilai sekularisme yang diterapkan secara ketat dan keberagaman agama yang berkembang dalam masyarakat semakin memunculkan masalah sosial, termasuk kecenderungan polarisasi dan diskriminasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan *laïcité* dapat meningkatkan kesulitan integrasi sosial bagi kelompok Muslim yang merasa terpinggirkan dalam struktur sosial yang lebih besar. Beberapa peneliti juga menyatakan bahwa kebijakan ini mengarah pada pembatasan hak-hak individu dalam mengungkapkan keyakinan agama mereka, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang seharusnya dilindungi di negara sekuler (Baumann, 2019).

### **Model Integrasi Moderat di Indonesia dan India**

Model hubungan antara agama dan negara yang diterapkan di Indonesia dan India menunjukkan pendekatan yang lebih moderat dibandingkan dengan sekularisme radikal yang diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Prancis. Meskipun keduanya mengakui pentingnya pluralisme dan kebebasan beragama, tantangan dalam implementasi hubungan agama dan negara tetap ada, terutama dalam konteks politisasi agama dan ketegangan antar kelompok agama. Indonesia dan India, sebagai negara dengan populasi agama yang sangat beragam, memiliki model integrasi yang berbeda, meskipun keduanya berusaha untuk mengakomodasi keberagaman agama dalam kehidupan bernegara.

### **Indonesia: Pancasila dan Moderasi dalam Hubungan Agama dan Negara**

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mengadopsi model moderat dalam hubungan agama dan negara yang diatur dalam dasar negara, Pancasila. Pancasila mengakui

pentingnya agama melalui prinsip pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa agama adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat dan negara. Di sisi lain, Pancasila juga menegaskan prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, yang mengharuskan penghargaan terhadap pluralisme dan keberagaman agama. Dalam kerangka Pancasila, negara memberikan kebebasan beragama kepada warganya, termasuk hak untuk memeluk dan menjalankan agama dengan bebas.

Namun, meskipun Pancasila memberikan dasar yang kokoh untuk pluralisme, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah politisasi agama. Dalam beberapa tahun terakhir, agama sering dijadikan alat politik untuk meraih kekuasaan, terutama dalam pemilu dan pemilihan pejabat publik.

Salah satu contoh paling signifikan dari politisasi agama adalah Pilkada DKI Jakarta 2017. Pemilihan ini mempertemukan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang politikus Kristen keturunan Tionghoa, dengan Anies Baswedan, seorang politikus Muslim. Pilkada ini menjadi sorotan internasional karena isu agama memainkan peran dominan dalam kampanye dan retorika politik.

Kasus ini bermula ketika Ahok dituduh melakukan penistaan agama setelah mengutip sebuah ayat Al-Qur'an dalam pidatonya. Tuduhan ini memicu demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh kelompok-kelompok Islam konservatif, seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mendesak agar Ahok diadili dan tidak dipilih kembali. Kampanye yang sangat berfokus pada agama memecah masyarakat menjadi dua kubu: pendukung Ahok yang pro-toleransi dan inklusivitas, serta pendukung Anies yang memanfaatkan identitas agama untuk menarik pemilih Muslim.

Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi contoh nyata bagaimana agama dapat dimobilisasi untuk membangun identitas politik yang kuat, tetapi pada saat yang sama menimbulkan polarisasi sosial. Isu ini menimbulkan ketegangan tidak hanya antara kelompok Muslim konservatif dan moderat, tetapi juga antara Muslim dan kelompok minoritas agama, seperti Kristen dan Tionghoa. Akhirnya, Ahok kalah dalam Pilkada, dan kasus ini memperdalam perdebatan tentang peran agama dalam politik di Indonesia.

### **Polarisasi Sosial Akibat Politisasi Agama**

Polarisasi akibat politisasi agama juga terlihat dalam Pemilu 2019, di mana isu agama memainkan peran besar. Para kandidat kerap kali memanfaatkan narasi keagamaan untuk menarik suara dari kelompok mayoritas, dengan memunculkan identitas agama yang dianggap lebih "Islamik". Hal ini menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok yang mendukung kandidat dengan ideologi agama tertentu dan mereka yang lebih pro-sekuler.

Dalam beberapa kasus, politisi mencoba mengaitkan identitas agama mereka dengan nilai-nilai tertentu yang dianggap lebih "benar" oleh sebagian besar warga negara. Hal ini sering kali menciptakan ketegangan antara kelompok Muslim konservatif dengan Muslim moderat atau antara Muslim dengan kelompok agama minoritas, seperti Kristen dan Hindu (Nugroho, 2018).

Banyak kritikus menyatakan bahwa politisasi agama dapat mengancam prinsip dasar Pancasila, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, politisasi agama dapat menyebabkan perpecahan sosial yang lebih dalam, dengan memunculkan "politik identitas" yang mendorong masyarakat untuk memilih berdasarkan afiliasi agama, bukan visi dan misi negara.

Kasus Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 menunjukkan betapa mudahnya agama digunakan sebagai alat politik di Indonesia. Beberapa akademisi berpendapat bahwa Indonesia perlu menegaskan kembali pemisahan yang jelas antara agama dan politik untuk mengurangi potensi konflik sosial akibat pengaruh agama dalam arena politik (Lembaga Survei Indonesia, 2020).

Langkah ini tidak berarti menghilangkan peran agama sepenuhnya, tetapi mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

### **India: Sekularisme Inklusif dan Ketegangan Antaragama**

India mengadopsi model sekularisme inklusif, yang mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman agama dalam ruang publik, tetapi dengan menjamin bahwa negara tidak boleh mendiskriminasi warganya berdasarkan agama. Konstitusi India menjamin kebebasan beragama kepada setiap individu dan berusaha untuk menjaga negara tetap netral dalam urusan agama. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sekularisme India menghadapi banyak tantangan, terutama dalam

hubungan antara Hindu dan Muslim. Ketegangan antaragama sering kali menjadi isu besar dalam politik India, dengan kelompok-kelompok politik tertentu yang menggunakan identitas agama untuk mendapatkan dukungan pemilih.

Sejak kemerdekaan, India telah berusaha untuk menjaga keseimbangan antara agama dan negara melalui kebijakan yang mendorong pluralisme. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan yang didorong oleh partai politik, seperti Bharatiya Janata Party (BJP), yang memiliki afiliasi kuat dengan Hindutva, semakin mengarah pada dominasi agama Hindu dalam politik. Partai BJP telah mengembangkan agenda politik yang mencerminkan kebijakan pro-Hindu, yang kadang-kadang mengarah pada marginalisasi kelompok Muslim dan Kristen. Salah satu contoh yang paling kontroversial adalah pengesahan undang-undang kewarganegaraan yang memungkinkan warga negara non-Muslim dari negara-negara tetangga (Pakistan, Bangladesh, Afghanistan) untuk mendapatkan kewarganegaraan India, sementara Muslim tidak diikutsertakan dalam kebijakan ini. Undang-undang ini, yang dikenal sebagai Citizenship Amendment Act (CAA), memicu protes besar-besaran di seluruh India dan memperburuk ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim (Singarimbun, 2019).

Kritik terhadap Sekularisme Inklusif di India: Sekularisme inklusif yang diterapkan di India kini menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal integrasi sosial dan politik. Banyak kritik menyebut bahwa meskipun India mengakui keberagaman agama dalam konstitusinya, dalam praktiknya ada kebijakan yang secara tidak langsung mendukung dominasi agama Hindu, yang menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, terutama Muslim. Para pengkritik berpendapat bahwa sekularisme inklusif India sering kali terdistorsi oleh politik identitas yang mengutamakan agenda Hindu, yang dapat mengarah pada ketidakadilan bagi kelompok minoritas agama (Chatterjee, 2018). Selain itu, kebijakan yang mengutamakan identitas agama tertentu dapat memperburuk polarisasi sosial dan politik, menciptakan ketegangan yang dapat mengancam stabilitas sosial di negara yang sangat pluralistik seperti India.

Dampak Ketegangan Agama pada Sosial dan Politik India: Ketegangan antaragama di India tidak hanya terbatas pada politik, tetapi juga melibatkan hubungan sosial antar kelompok agama. Konflik-konflik sektarian antara Hindu dan Muslim sering kali meletus dalam bentuk kekerasan, seperti yang terlihat dalam kerusuhan yang terjadi pada tahun 2002 di Gujarat, yang menewaskan ratusan orang, sebagian besar dari komunitas Muslim. Kekerasan seperti ini mengindikasikan bahwa politik agama yang berfokus pada identitas agama dapat memperburuk polarisasi dan menciptakan ketegangan antar kelompok, yang berisiko merusak kedamaian sosial (Khilnani, 2019). Berikut adalah pembahasan yang dilengkapi dengan sumber dan rujukan:

### **Implikasi Sosial dan Politik Pemisahan Agama dan Politik**

Pemisahan agama dan politik bertujuan untuk menciptakan ruang netral dalam pemerintahan, menjaga kebebasan beragama, dan melindungi hak individu tanpa memihak pada kelompok agama tertentu. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan negara sekuler, seperti di Amerika Serikat dan Prancis, di mana kebijakan sekularisme berusaha menjamin kesetaraan bagi semua agama.

Namun, kebijakan sekularisme yang terlalu ketat dapat membawa implikasi negatif, terutama bagi kelompok minoritas. Misalnya, kebijakan *laïcité* di Prancis sering kali dikritik karena melarang simbol keagamaan di ruang publik, termasuk pemakaian jilbab. Langkah ini dianggap meminggirkan komunitas Muslim, seperti yang dijelaskan oleh Charle (2018), menciptakan ketegangan sosial dan perasaan marginalisasi. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan pendekatan sekularisme yang inklusif agar kebijakan tidak berujung pada diskriminasi terhadap minoritas (Bowen, 2010).

### **Integrasi Agama dan Politik**

Integrasi agama dalam politik dapat memberikan legitimasi moral yang kuat bagi kebijakan publik, terutama dalam masyarakat yang religius. Nilai-nilai agama sering kali memberikan kerangka etis bagi pembentukan kebijakan, misalnya dalam isu-isu seperti keadilan sosial, perlindungan lingkungan, atau pengentasan kemiskinan. Di negara-negara seperti Turki dan Pakistan, politik berbasis

agama kerap menjadi alat untuk mewujudkan nilai-nilai moral tertentu dalam tata kelola pemerintahan (Hefner, 2018).

Namun, integrasi agama dalam politik juga membawa risiko signifikan, termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan polarisasi sosial. Di Indonesia, politisasi agama sering kali memperburuk hubungan antara mayoritas dan minoritas, meskipun prinsip Pancasila berusaha menjaga kerukunan antarumat beragama. Fenomena ini terlihat dalam kasus Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana sentimen agama digunakan sebagai alat politik yang memicu polarisasi masyarakat (Hadiz, 2017). Hal serupa terjadi di India, di mana Hindutva digunakan untuk mendominasi politik, sehingga meminggirkan kelompok Muslim dan minoritas lainnya (Gupta, 2020).

### **Implikasi Kebijakan Publik**

Baik pemisahan maupun integrasi agama dalam politik memengaruhi kebijakan publik secara mendalam. Dalam model sekularisme yang ketat, kebijakan publik cenderung memisahkan nilai-nilai agama, yang dapat membuat kelompok religius merasa tidak terakomodasi. Sebaliknya, integrasi agama ke dalam politik dapat memberikan dasar moral yang kuat, tetapi berpotensi memicu kebijakan diskriminatif. Oleh karena itu, negara perlu menyeimbangkan kebutuhan antara menjaga kebebasan beragama dan memastikan inklusivitas dalam proses pembuatan kebijakan.

### **Dinamika Global**

Dalam konteks global, isu pemisahan dan integrasi agama-politik juga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik. Di Timur Tengah, politik berbasis agama sering kali menjadi landasan legitimasi pemerintah, seperti di Iran dan Arab Saudi. Namun, pendekatan ini sering menghasilkan otoritarianisme agama yang membatasi kebebasan individu. Di sisi lain, negara-negara seperti Kanada mencoba mengadopsi pendekatan pluralisme agama, di mana ekspresi agama diakomodasi tanpa mendominasi kebijakan publik (Taylor, 2012).

### **KESIMPULAN**

Pemisahan agama dan politik merupakan isu multidimensi yang kompleks, di mana setiap negara menghadapi tantangan yang unik sesuai dengan sejarah, budaya, dan struktur sosialnya. Tidak ada satu model universal yang dapat diterapkan di semua negara, sehingga diperlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat.

Negara dengan sistem sekularisme ketat seperti Prancis, menghadapi tantangan dalam menjaga netralitas negara tanpa meminggirkan ekspresi keagamaan. Sementara itu, negara dengan integrasi agama-politik seperti Indonesia dan India, sering kali menghadapi risiko polarisasi sosial dan diskriminasi terhadap minoritas. Oleh karena itu, kunci keberhasilan dalam mengelola hubungan antara agama dan politik terletak pada kemampuan negara untuk menyeimbangkan prinsip kebebasan beragama, inklusivitas sosial, dan netralitas politik.

Dalam era digital yang semakin terkoneksi, hubungan antara agama dan politik menjadi semakin kompleks. Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk opini publik, menyebarkan narasi agama, dan bahkan memobilisasi dukungan politik. Di sisi lain, media sosial juga menjadi arena konflik yang memicu intoleransi dan polarisasi. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut tentang dampak media sosial terhadap hubungan agama dan politik sangat diperlukan.

### **REKOMENDASI**

Untuk mengelola hubungan agama dan politik secara efektif, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

Mengembangkan Dialog Antaragama: Fasilitasi dialog antaragama secara rutin untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda.

Bentuk forum lintas agama yang melibatkan tokoh agama, akademisi, dan pemimpin masyarakat untuk merumuskan solusi kolektif terhadap isu-isu sosial.

Mengadopsi Pendekatan Fleksibel: Bangun kebijakan yang memungkinkan interaksi antara agama dan politik tanpa mengorbankan prinsip netralitas negara.

Dalam konteks sekuler, kebijakan harus menciptakan ruang bagi ekspresi keagamaan tanpa mendominasi urusan negara.

Di negara dengan integrasi agama-politik, penting untuk menjamin hak kelompok minoritas dan menjaga keseimbangan kekuasaan.

Meningkatkan Pendidikan Multikultural: Integrasikan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum pendidikan, dengan fokus pada penghormatan terhadap perbedaan agama, budaya, dan identitas.

Luncurkan kampanye kesadaran publik untuk mempromosikan harmoni sosial dan menentang narasi kebencian berbasis agama.

Pengawasan dan Regulasi Media Sosial: Regulasikan penggunaan media sosial untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian dan polarisasi berbasis agama.

Kembangkan infrastruktur digital yang mendukung penyebaran narasi positif tentang toleransi agama.

Libatkan perusahaan teknologi untuk memprioritaskan moderasi konten yang merusak harmoni sosial.

Mendorong Penelitian dan Kebijakan Berbasis Data: Tingkatkan investasi dalam penelitian multidisiplin untuk mengeksplorasi hubungan agama dan politik, terutama dalam konteks globalisasi dan digitalisasi.

Gunakan data dari penelitian untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, A. (2018). *Politik Islam dan Negara: Kajian Tentang Teori Kekhalifahan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Amsyari, M. (2017). *Sekularisme dan Demokrasi: Analisis Hubungan Agama dan Negara di Amerika Serikat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barton, G. (2002). *Indonesia's Struggle: Jemaah Islamiyah and the Soul of Islam*. Sydney: UNSW Press.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bowen, J. R. (2010). *Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State, and Public Space*. Princeton University Press.
- Casanova, J. (1994). *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press.
- Charle, P. (2018). *Laïcité: Sejarah dan Penerapannya di Prancis*. Jakarta: Gramedia.
- Charle, S. (2018). *Secularism and Muslim Identity in France*. *Social Research Journal*.
- Fox, J. (2008). *A World Survey of Religion and the State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gupta, N. (2020). *The Politics of Hindu Nationalism in India: An Analysis of Hindutva Ideology*. *Asian Journal of Political Science*.
- Habermas, J. (2006). *Religion in the Public Sphere*. Cambridge: Polity Press.
- Hadiz, V. (2017). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hefner, R. W. (2018). *Shari'a Law and Modern Muslim Ethics*. Indiana University Press.
- Jefferson, T. (1802). *Letter to the Danbury Baptists*. Washington D.C.: Library of Congress.
- Locke, J. (1689). *A Letter Concerning Toleration*. London: Awnsham Churchill.
- Modood, T. (2013). *Multiculturalism: A Civic Idea*. London: Polity Press.
- Mustamin, C. (2020). *Pancasila dan Agama: Menjaga Keharmonisan di Indonesia*. Makassar: Pustaka Kareba.
- Singarimbun, M. (2019). *Politik Agama di India: Antara Kebebasan dan Ketegangan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Siregar, H. (2019). *Agama dan Politik di Indonesia: Dinamika dan Kontroversi*. Bandung: Mizan.
- Smith, A. (2006). *Secularism and the State: The Impact of Religion on Politics*. Cambridge: Cambridge

University Press.

Smith, S. D. (2008). *The Disenchantment of Secularism*. Harvard: Harvard University Press.

Taylor, C. (2012). *The Politics of Recognition*. Princeton University Press.